

## MILANGKALA DESA SAGULING: KAJIAN SEJARAH LOKAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT CIAMIS

Aan Anwar Sihabudin<sup>1, 2</sup>, Andang Andi<sup>2</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1, 2</sup>

Email: [aananwarsihabudin@unigal.ac.id](mailto:aananwarsihabudin@unigal.ac.id)

### ABSTRAK

*Pembahasan Ini Mengkaji Sejarah Desa Saguling, Sebuah Wilayah Yang Terletak Di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Penelitian Ini Menggunakan Metode Sejarah Yang Meliputi Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, Dan Historiografi. Meskipun Asal-Usul Desa Saguling Masih Belum Sepenuhnya Terungkap, Melalui Penelusuran Cerita Lisan Dan Toponimi, Ditemukan Keterkaitan Antara Desa Ini Dengan Kerajaan Sunda Galuh Kawali Pada Abad Ke-15 Masehi. Keberadaan Tokoh Wangun Denta Kadea, Yang Merupakan Keluarga Dari Raja Sunda Kawali Prabu Niskala Wastu Kancana, Menjadi Titik Penting Dalam Narasi Pembentukan Desa Saguling. Selain Itu, Artikel Ini Juga Membahas Jejak-Jejak Sejarah Lainnya Seperti Petilasan Dan Makam Yang Tersebar Di Wilayah Desa Saguling, Yang Menambah Dimensi Mistis Dan Spiritual Dalam Sejarah Desa Ini. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Merekonstruksi Sejarah Lokal Desa Saguling, Memahami Identitas Masyarakatnya, Serta Mengungkap Warisan Budaya Yang Perlu Dilestarikan.*

**Kata Kunci:** *Sejarah Lokal, Desa Saguling, Wangun Denta Kadea, Kerajaan Sunda Galuh Kawali, Cerita Lisan, Toponimi, Petilasan, Makam.*

### ABSTRACT

*This discussion examines the history of Saguling Village, an area located in Baregbeg District, Ciamis Regency. This study uses historical methods that include heuristics, verification, interpretation, and historiography. Although the origins of Saguling Village are still not fully revealed, through the search for oral stories and toponymy, a connection was found between this village and the Sunda Galuh Kawali Kingdom in the 15th century AD. The existence of the figure Wangun Denta Kadea, who is a family member of the Sunda Kawali King Prabu Niskala Wastu Kancana, is an important point in the narrative of the formation of Saguling Village. In addition, this article also discusses other historical traces such as hermitages and graves scattered in the Saguling Village area, which add mystical and spiritual dimensions to the history of this village. This study aims to reconstruct the local history of Saguling Village, understand the identity of its people, and reveal cultural heritage that needs to be preserved.*

**Keywords:** *Local History, Saguling Village, Wangun Denta Kadea, Sunda Galuh Kawali Kingdom, Oral Stories, Toponymy, Stele, Tombs.*

## **PENDAHULUAN**

Kajian mengenai sejarah dan asal-usul Desa Saguling masih didasarkan pada sumber lisan dari beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa. Hingga saat ini, belum ditemukan bukti tertulis yang secara eksplisit menguraikan sejarah pembentukannya. Namun, eksistensi desa sebagai entitas sosial dan pemerintahan dapat ditelusuri dari berbagai prasasti yang ditemukan di wilayah Jawa Barat, salah satunya adalah Prasasti Astana Gede Kawali. Prasasti di situs Astana Gede Kawali pertama kali ditemukan oleh Letnan Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles, pada tahun 1817 (Kartakusuma, 2005; Raffles, 2014; Suganda, 2015:63-65; Herlina et al., 2019). Prasasti ini mengindikasikan bahwa desa telah eksis jauh sebelum era kolonialisme Belanda. Bukti ini memperkuat argumen bahwa konsep desa di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan tidak serta-merta merupakan hasil kebijakan kolonial.

Tulisan pada prasasti menunjukkan bahwa dalam struktur pemerintahan kerajaan telah terdapat sistem pembagian tugas dan urusan desa yang bersifat administratif dan fungsional (Djaenuri, Modul 01 Sejarah Terbentuknya Desa). Berdasarkan kajian arkeologi yang dilakukan oleh Titi Surti Nastiti dan Hasan Djafar, prasasti ini dituliskan dalam aksara dan bahasa Sunda Kuna pada batu alam dengan ukuran bervariasi. Tulisan yang

terdapat pada keempat sisi prasasti menggambarkan keberadaan Prabu Raja Wastu sebagai penguasa yang memperhatikan pengelolaan desa, pembangunan pertahanan, serta kesejahteraan rakyat.

Prasasti ini menunjukkan bahwa desa telah memiliki struktur pemerintahan yang jelas, dengan adanya pengelolaan wilayah, perlindungan desa, serta sistem administrasi yang diatur oleh kerajaan. Konsep ini mencerminkan teori pemerintahan tradisional yang menyatakan bahwa desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang otonom. Dalam perspektif ilmu sosial, eksistensi desa yang tertulis dalam prasasti ini menunjukkan bahwa desa bukan hanya sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Selain Prasasti Kawali, Prasasti Walandit juga memberikan gambaran historis mengenai desa sebagai unit pemerintahan di era pra-kolonial. Prasasti ini ditemukan di daerah Tengger, Jawa Timur, dan mencatat adanya hubungan langsung antara desa dan pemerintahan pusat. Dalam prasasti ini, disebutkan bahwa daerah Tengger dibebaskan dari pembayaran pajak karena dianggap sebagai tanah suci. Hal ini menunjukkan bahwa desa telah memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan saat itu, termasuk dalam aspek ekonomi dan keagamaan (Setiaini & Ganefo, 2020). Prasasti Walandit

terdiri dari dua sisi yang mencatat berbagai kebijakan raja terkait dengan desa. Isi prasasti ini menggambarkan bahwa desa memiliki hak-hak tertentu yang diakui oleh kerajaan dan bahwa desa sebagai entitas sosial memiliki hubungan struktural dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan catatan sejarah yang diperoleh dari Prasasti Kawali dan Prasasti Walandit, dapat disimpulkan bahwa desa sebagai unit pemerintahan telah ada sejak zaman kerajaan. Desa bukan sekadar pemukiman, tetapi telah memiliki sistem administrasi yang dikelola secara adat dan telah mendapatkan pengakuan dari penguasa. Dalam konteks ilmu pemerintahan, keberadaan desa mencerminkan bentuk awal dari desentralisasi kekuasaan yang memungkinkan desa menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan politik secara mandiri. Selain itu, fakta bahwa desa telah eksis sebelum era kolonial menunjukkan bahwa sistem pemerintahan desa di Indonesia memiliki akar budaya yang kuat dan bukan semata-mata warisan dari kebijakan kolonial. Hal ini memperkuat argumen dalam ilmu sosial bahwa desa adalah unit sosial yang berkembang secara organik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, studi mengenai prasasti-prasasti kuno ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai sejarah pemerintahan desa dan relevansinya terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia pada masa lalu dan masa kini.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut (Yamin, 1958: 4), sejarah mula-mula berasal dari bahasa Arab “*syajara*”, artinya terjadi, “*syajaratun*” (baca: syajarah) artinya pohon kayu. Pohon menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari bumi ke udara dengan mempunyai cabang, dahan dan daun, kembang atau bunga serta buahnya ( Modul 1 Pengertian dan Konsep Sejarah, Prof. Dr. H. Ismaun, M.Pd. repository.ut.ac.id )

Kemudian sejarah Sartono Kartodirdjo, adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu (Sartono Kartodirdjo, 1982: 12).

Sehingga, untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi di masa lampau, perlu dilakukan pendekatan melalui lintas cabang ke ilmuwan. Dengan maksud secara keilmuan yaitu, karena sejarah didalamnya akan menguraikan cerita, lisan ataupun tulisan.

Hal ini akan memerlukan ilmu bantu, diantaranya ilmu arkeologi, filologi, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Tentu semuanya itu, akan diungkap dan di teliti melalui suatu metode penelitian sejarah.

Collingwood juga berpendapat bahwa tugas sejarawan adalah menyelidiki kembali pemikiran manusia di masa lampau. Ia percaya

bahwa masa lalu dapat dipentaskan kembali dalam benak sejarawan melalui evidensi dan imajinasi.

Collingwood adalah seorang filsuf, sejarawan, dan arkeolog asal Inggris, lahir tanggal 22 Februari 1889 di Cartmel Fell, Lancashire, Inggris. Kata kunci, dari pendapat Collingwood tersebut, adalah “*penyelidikan*“. Untuk melakukan penyelidikan sejarah, maka harus digunakan rumus 5W+1H untuk panduan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian sejarah. 5W+1H adalah singkatan dalam bahasa Inggris, sebagai kata tanya yaitu:

What (apa), Who (siapa), When (kapan), Where (dimana), Why (mengapa), How (bagaimana). Untuk membantu penulisan sejarah Desa Saguling Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis, penulis harus melakukan penelitian dan menggunakan perangkat aturan untuk mencari petunjuk-petunjuk yang menghasilkan informasi agar akurat dan obyektif. Menurut Gilbert J. Garraghan, penelitian sejarah adalah kumpulan aturan dan prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilai secara kritis, dan menyajikan hasil dalam bentuk tertulis. Kemudian pendapat Gay dalam tulisan Sukardi (2003; 203) secara definisi penelitian sejarah dapat diartikan sebagai salah satu penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis, yang berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab,

pengaruh, atau perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekarang, dan mengantisipasi kejadian yang akan datang.

C. Behan McCullagh ( 2010 ) mengungkapkan adanya tiga fungsi sejarah. Pertama, sejarah memiliki fungsi untuk membangun identitas kelompok-kelompok sosial, institusi, dan negara. Kedua, sejarah memiliki fungsi untuk mengidentifikasi tren-tren pada pekerjaan yang dapat meningkatkan atau menghasilkan kualitas hidup. Ketiga, sejarah berfungsi untuk memberikan banyak pelajaran tentang nilai-nilai dan pewarisan nilai ( Sejarah Lisan Metode Dan Praktek, Reiza D. Dienaputra Penerbit Balatin Bandung ) .

Penulisan sejarah dikenal dengan istilah Historiografi, yaitu merupakan hasil dari yang sudah di uji dan ditafsirkan berdasarkan penelitian sejarah.

Adapun Langkah-langkah penelitian sejarah yaitu : 1). Pemilihan Topik, 2). Heuristik, 3). Verifikasi, 4). Interpretasi, 5). Historiografi.

## **METODE**

Dalam buku *Metode Sejarah* Edisi Revisi 2020, Prof. Dr. Nina Herlina, M.S., menguraikan bahwa setiap disiplin ilmu memiliki seperangkat aturan dan petunjuk yang mendukung ketepatan hasilnya. Kompleksitas aturan dan petunjuk ini disebut sebagai metode atau teknik (Garraghan, 1957: 33).

Menurut Frawita Sari (1406515791, Pascasarjana Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia), metode sejarah memiliki empat tahapan dalam kerangka ilmiah, yaitu:

### 1. Heuristik

Tahap awal dalam penelitian sejarah adalah heuristik, yang merupakan teknik atau cara untuk menemukan sumber. Sumber dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi langsung di lapangan, atau wawancara. Saat ini, data sejarah dapat diperoleh tidak hanya melalui studi pustaka tetapi juga melalui media cetak dan elektronik. Seorang peneliti harus memahami cara menangani bukti sejarah serta menghubungkannya dengan sumber lain (Alian, 2012: 9-10). Sumber sejarah diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, serta sumber asli dan sumber palsu. Sumber primer adalah kesaksian langsung dari individu atau kelompok yang menyaksikan suatu peristiwa. Sumber sekunder adalah kesaksian tidak langsung yang telah melalui perantara. Menurut Imam Bernadib, sumber sekunder berupa dokumen yang menguraikan atau membahas sumber primer, seperti monograf, buku pelajaran, hasil kongres, makalah, dan prasaran (Yass, 2004: 34-35). Sumber asli mengandung gagasan segar yang belum diubah atau diterjemahkan, sedangkan sumber palsu merupakan kebalikannya.

### 2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tahap selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah kritik sumber, yakni evaluasi terhadap keabsahan dan kredibilitas sumber sejarah yang digunakan. Kritik sumber bertujuan untuk menentukan apakah suatu sumber asli atau palsu, serta apakah isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Alian, 2012: 11).

Kritik sumber terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik ekstern dan kritik intern:

- Kritik Ekstern: Bertujuan menentukan keaslian sumber melalui penyelidikan aspek fisik, seperti jenis kertas, tinta, tulisan, gaya bahasa, dan ejaan yang digunakan (Kuntowijoyo, 1995: 99).
- Kritik Intern: Bertujuan menilai kebenaran isi sumber atau data dengan membandingkannya dengan sumber lain guna memastikan keakuratan informasi dan menghindari subjektivitas (Yass, 2004: 35-36).

Secara umum, kritik ekstern memastikan keaslian sumber, sedangkan kritik intern mengevaluasi keakuratan informasi yang terkandung dalam sumber tersebut.

### 3. Interpretasi

Langkah ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran fakta-fakta yang diperoleh dari sumber sejarah. Menurut Bekker, interpretasi adalah upaya memahami dan menghubungkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi agar memperoleh

makna yang relevan dengan tema penelitian. Interpretasi sering disebut sebagai analisis sejarah, yang mencakup dua metode utama: analisis (penguraian data secara terminologis) dan sintesis (penyatuan data yang ada) (Kuntowijoyo, 1995: 100).

Interpretasi bertujuan menghubungkan fakta dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu peristiwa sejarah (Yass, 2004: 43). Dalam tahap ini, peneliti menguraikan data berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang terkandung dalam sumber, kemudian melakukan sintesis untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dengan demikian, interpretasi memungkinkan peneliti memahami hubungan antar fakta dan memberikan penafsiran yang mendalam mengenai suatu peristiwa.

Interpretasi sejarah dapat didasarkan pada berbagai aspek, termasuk ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan geografi.

#### 4. Historiografi

Tahap akhir dalam metode sejarah adalah historiografi, yaitu teknik penulisan sejarah berdasarkan data yang telah diperoleh melalui proses heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. Historiografi merupakan rekonstruksi imajinatif masa lampau yang disusun secara sistematis berdasarkan data sejarah (Gootschalk, 1986: 32).

Penulisan sejarah umumnya disusun berdasarkan tiga pendekatan utama:

1. Kronologi: Penyajian peristiwa secara berurutan untuk memastikan kesinambungan sejarah.
2. Kausalitas: Analisis hubungan sebab-akibat dalam suatu peristiwa sejarah.
3. Imajinasi Historis: Mengisi kesenjangan dalam data sejarah dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip akademis.

Selain itu, historiografi dapat menggunakan pendekatan koligasi, yaitu metode yang menghubungkan peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak berkaitan tetapi memiliki keterkaitan erat setelah dianalisis lebih dalam (Alian, 2012: 13-14).

Dengan menerapkan keempat tahapan metode sejarah ini, penelitian sejarah dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap desa terbentuk dengan latar belakang sejarah dan asal-usul yang berbeda. Hal ini juga berlaku bagi Desa Saguling, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, yang memiliki karakteristik khas dibandingkan desa lainnya.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis, kondisi alam, kelompok masyarakat, serta adat dan budaya yang berkembang di dalamnya. Proses terbentuknya sebuah desa

umumnya memerlukan waktu yang cukup lama.

Penamaan suatu tempat merupakan bagian dari kajian toponimi, yaitu ilmu yang mempelajari asal-usul nama tempat serta keseluruhan toponimi dalam suatu wilayah (Rais dkk., 2008, hlm. 5).

Hingga saat ini, belum ditemukan bukti otentik mengenai asal-usul Desa Saguling. Informasi yang ada masih bersumber dari cerita lisan yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat. Sumber sejarah yang tersedia lebih banyak berbentuk narasi lisan tanpa adanya dokumen primer yang mendukung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 25 November 2024 dengan Bapak Sali, seorang tokoh masyarakat Dusun Saguling Kolot sekaligus sejarawan lokal, disebutkan bahwa asal-usul nama Saguling berkaitan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis pada 6 Oktober 1970 melalui Surat Keputusan Nomor 36/X/KPTS/DPRD/1970 dan Nomor 5/II/KPTS/DPRD/1971 mengenai pembentukan panitia penyusunan sejarah Galuh. Dalam pelaksanaannya, panitia ini didampingi oleh tim ahli sejarah dari IKIP Bandung yang dipimpin oleh Drs. Rd. H. Said Raksanegara.

Pada 20 Mei 1972, ketika berada di daerah Gunungsari, Drs. Rd. H. Said Raksanegara mengungkapkan bahwa nama Saguling berkaitan dengan

peristiwa yang terjadi pada 23 Maret 1480 di Angsana Geger Honje (sekarang dikenal sebagai Sawah Jati). Nama Saguling pertama kali diberikan oleh Wangun Denta Kadea, seorang anggota keluarga kerajaan.

Wangun Denta Kadea merupakan keturunan Raja Sunda Kawali, Prabu Niskala Wastu Kancana. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan dalam berbagai bidang ilmu. Ketika pertama kali tiba di wilayah Saguling, ia bertemu dengan Eyang Sento di daerah Kelewih. Eyang Sento adalah penduduk pertama yang membuka wilayah tersebut, yang kini dikenal sebagai Situs Keramat Tilu Dusun Kelewih.

Setelah pertemuannya dengan Eyang Sento, Wangun Denta Kadea mendapat petunjuk untuk menetap di wilayah yang memiliki kontur bukit dengan tanah subur yang cocok untuk bercocok tanam dan beternak. Tempat tersebut kemudian dikenal sebagai Pasir Boma. Menurut Bapak Sali, Pasir Boma berarti bukit yang subur dan makmur.

Setelah berhasil membuka lahan di Pasir Boma, Wangun Denta Kadea kembali ke daerah Selamanik. Di sana, ia diberi gelar "Wangun Denta Kadea Pasir Boma" oleh Mbah Bangun Tapa dan para ulama, yang berarti anggota keluarga raja yang bertani. Ia juga memperoleh ajian "Jaran Guyang Putih" (Sirrullah, Dzatullah, Sifatullah, Karamatullah, Wujudullah, Af'alullah, Kunfayakun). Setelah menerima ajian tersebut, ia mendapat gelar baru, "Kyai

Wangun Denta Kadea Pasir Boma Ato Wijaya," dengan para pengawal seperti Wira Patih Sancang, Aji Sakti Wiranata, dan Adipati Sancang Konyata.

Setelah mengembara ke berbagai daerah, Wangun Denta Kadea akhirnya kembali ke Saguling dan menetap bersama para pengikutnya, termasuk Raden Dirga Agung, Wira Patih Sancang, Aji Sakti Wiranata, dan Panca Sona Wiramangun.

Sebelumnya, daerah Angsana Geger Honje atau Saguling telah dibuka oleh seorang tokoh bernama Suramanggala. Dalam suatu acara babarit (sedekah bumi), Wangun Denta Kadea memberikan nama resmi bagi wilayah tersebut dengan menyatakan dalam bahasa Sunda bahwa seluruh masyarakat di daerah ini bersatu padu dan saling mendukung. Oleh karena itu, pada 23 Maret 1480, ia menetapkan nama "Saguling."

Ketika Kabupaten Galuh berubah nama menjadi Kabupaten Ciamis, Bupati Ciamis ke-16, Sastrawinata, menunjuk Den Ia Pernawijaya sebagai Kuwu (Kepala Desa) pertama di Saguling pada 23 Maret 1931. Pada saat itu, belum terdapat kantor desa, sehingga tugas

pemerintahan dilakukan di rumah Pakuwon, yang sebelumnya milik Bapak Suwanda.

Sebagai Kuwu, Pernawijaya mengangkat kepala dusun melalui musyawarah, yaitu:

1. Askani sebagai Kepala Dusun Saguling Kolot,
2. Aki Marwi sebagai Kepala Dusun Desa,
3. Aki Jasman sebagai Kepala Dusun Kelewih,
4. Bapak Basari sebagai Kepala Dusun Cilongkrang (sekarang Desa Mekarjaya, sebelum dimekarkan dari Desa Saguling).

Dalam kepemimpinannya, Pernawijaya meraih berbagai prestasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pada masa itu, staf desa terdiri dari Polisi Desa ("Kulisi") yang dijabat oleh Aki Martawi dari Sudimampir. Bagian administrasi desa disebut "Kabayan" atau "Gegendir," yang bertugas mengurus surat-menyurat, dipegang oleh Aki Tabri. Kepemimpinan Kuwu Pernawijaya berakhir pada 23 Maret 1936.

Table 1. Nama Nama Kepala Desa Saguling

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1931 s.d 1936	DEN IA PERNAWIJAYA	KADES PERTAMA
2	1936 s.d 1937	MAS MURTAMAD	PJS
3	1937 s.d 1945	RD. MAS JAYADIPURA	DEFINITIF
4	1945 s.d 1946	RD. MAS JAYA SUJANA	PJS
5	1946 s.d 1951	DAYAT HIDAYAT	DEFINITIF
6	1951 s.d 1954	RD. JAYA SUJANA	DEFINITIF
7	1954 s.d 1966	ARJO SAPUTRA	DEFINITIF
8	1966 s.d 1968	DARSA	PJS
9	1968 s.d 1982	DORI SURJO	DEFINITIF
10	1982 s.d 1983	ROSID	PJS
11	1983 s.d 1984	K SUHERLAN	DEFINITIF
12	1984 s.d 1992	IWA KS	DEFINITIF
13	1992 s.d 1994	EDI KARSO	PJS
14	1994 s.d 2002	E SUKANDA	DEFINITIF
15	2002 s.d 2004	ASKAM RIKANDA	DEFINITIF
16	2004 s.d 2005	LUMRI	PJS
17	2005 s.d 2017	SURAHMAN	DEFINITIF
18	2017 s.d 2018	ENDANG KS	DEFINITIF
19	2018 s.d 2027	OTONG SUTARMAN	DEFINITIF

## KESIMPULAN

Berikut adalah perbaikan narasi dengan penulisan yang lebih efektif dan akademis tanpa mengubah makna: Simpulan mengenai sejarah Desa Saguling, sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, menunjukkan bahwa asal-usul nama "Saguling" dan terbentuknya desa ini memiliki catatan sejarah yang panjang.

Masyarakat Desa Saguling memiliki kesadaran tinggi dalam membina kerukunan serta menjaga hubungan sosial, agama, dan budaya. Kehidupan mereka ditata secara harmonis, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang telah diwariskan

oleh para pendahulu. Hal ini tampak dari peran tokoh yang memberi nama Saguling, yaitu Wangun Denta Kadea, serta Kepala Desa pertama, Pernawijaya, yang membangun masyarakat dengan pendekatan persuasif dan demokratis.

Secara filosofis dan sosiologis, makna nama "Saguling" dalam bahasa Sunda adalah:

### Bahasa Sunda:

*"Sadaya na ge urang Saguling mah sagulung sagalang sauyunan, tara pagiri-giri calik tara pagirang-girang tampian, lamun badami sakali ngaguling ge jadi, moal seueur teuing badami bisa ngalaksanakan pagawean."*

### Terjemahan:

*"Seluruh masyarakat Saguling bersatu dalam kerukunan, seia-sekata, saling menghormati, dan jika telah mencapai kesepakatan, mereka tidak berlarut-larut dalam musyawarah, melainkan langsung melaksanakan pekerjaan."*

Dengan demikian, secara etimologis, nama "Saguling" berasal dari istilah Sunda "Sagulung-Sagalang", yang mencerminkan semangat kebersamaan, musyawarah, mufakat, serta kehidupan yang harmonis, baik di antara masyarakat maupun dalam menjaga keseimbangan alam.

Adapun mengenai tanggal berdirinya Desa Saguling, berdasarkan sumber sejarah yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bupati Ciamis ke-16, Sastrawinata, secara resmi menunjuk Den Ia Pernawijaya, keturunan dari Bupati Imbanagara, sebagai Kuwu (Kepala Desa) pertama di Saguling pada **23 Maret 1931**.
  2. Masa kepemimpinan Kuwu pertama, Pernawijaya, berlangsung hingga **23 Maret 1936**.
- De Haan, F. (1941). *Priangan: De Preanger Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1818*. Batavia: BGKW.
- Dienaputra, R. D. (2020). *Sejarah lisan: Metode dan praktik*. Balatin.
- Hadiah, Y. K., Raksanegara, A., Indaniah, A., & Saptiah, N. (1979). *Sastra lisan Sunda, mite, fabel, dan legenda 1*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atja. (1968). *Carita Parahiyangan: Naskah titilar karuhun urang Sunda*. Jajasan Kebudajaan Nusalarang.
- Atja & Rohaedi. (1991). *Naskah sastra sejarah Rajya Rajya Bhumi Nusantara Parwa Ayat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bloch, M. (1966). *French rural history: An essay on its basic characteristics*. Routledge Taylor & Francis Group.
- De Graaf, H. J. (2002). *Puncak kekuasaan Mataram: Politik ekspansi Sultan Agung* (terj.). Grafiti.
- Karlina, N., Yunus, A., Rosyadi, Y., & Ganda, Y. (1993). *Serat Siksa Kanda Karesian*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi sejarah*. PT Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Muara Padiatra, A. (2020). *Ilmu sejarah: Metode dan praktik*. JSI Press.

- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Erlangga.
- Nurcholis, H. (2017). *Pemerintah desa: Unit pemerintahan semu dalam sistem NKRI*. Bee Media Pustaka.
- Nurwansah, I. (2020). *Siksa Kandang Karesian: Teks dan terjemahan*. Perpunas Press.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (n.d.). *Pemerintahan desa*. Zanapa Publishing.
- Saptono, N. (n.d.). *Tata ruang kota Ciamis pasca perdagangan dunia abad ke-19–20*. Balai Arkeologi Jawa Barat.
- Sofiani, Y. (2018). *Perubahan kedudukan dan kekuasaan bupati di Priangan pada tahun 1800-1916*. *Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, 1(1).
- Sofiani, Y. (n.d.). *Pemimpin tradisional dalam birokrasi modern: Perubahan kekuasaan dan kedudukan bupati-bupati Galuh (1836-1916)*.
- Subandi, Y., Kusumawati, I., The, H. Y., Primawati, N. H., Wannazemi, H., Rahman, A., & Jermias, E. O. (2024). *Pengantar sejarah*. Widina Media Utama.
- Tahir, M. I. (2012). *Sejarah perkembangan desa di Indonesia: Desa masa lalu, masa kini, dan bagaimana masa depannya*. *Jurnal MIPI*.
- Yetty, H., Raksanegara, A., Indaniah, A., & Saptiah, N. (1979). *Sastra lisan Sunda, mite, fabel dan legenda*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zulkarnain. (n.d.). *Serba-serbi tanam paksa*. *ISTORIA*, 8(1).
- Jurnal & Artikel:**
- Angkianata, Y. P., & Al-Uyun, D. (2015). *Perubahan kewenangan pemerintah desa di Indonesia*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum.

- Herlina, N., Muhsin, M., Mahzuni, D., & Darsa, U. A. (n.d.). *Sosialisasi hasil ekskavasi situs Astana Gede Kawali kepada aparat pemerintah dan masyarakat sekitar situs*. Departemen Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran.
- Noorduyn, J. (1962). *Het begingedeelte van de Carita Parahyangan. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 118(4), 405-432. KITLV.
- Saptono, N. (n.d.). *Tata ruang kota Ciamis pasca perdagangan dunia abad ke-19–20*. *Jurnal Panalungtik*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.